

DISERTASI
PERMODELAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN
DANA BERGULIR UPK PNPM MANDIRI PERDESAAN PASCA
PENGAKHIRAN PROGRAM



OLEH :
HADI SULISTYO
NIM : 117160005

PROGRAM STUDI DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2020

**PERMODELAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN
DANA BERGULIR UPK PNPM MANDIRI PERDESAAN PASCA
PENGAKHIRAN PROGRAM**

DISERTASI

Untuk memperoleh Gelar Doktor
dalam Program Studi Administrasi Publik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Hadi Sulisty

NIM: 1171600005


**PROGRAM STUDI DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
SURABAYA
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN
UJIAN TERBUKA DISERTASI**

**PERMODELAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN
DANA BERGULIR UPK PNPM MANDIRI PERDESAAN PASCA
PENGAKHIRAN PROGRAM**

Disertasi ini telah disetujui untuk diuji
Pada tanggal, 4 November 2020

Promotor,



Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS

Ko- Promotor,



Dr. Achluddin Ibnu Rochim, SH., M.SI

Mengetahui
Dekan


Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Dr. Endro Tjahjono, MM.

Mengesahkan
Ketua

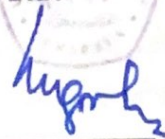


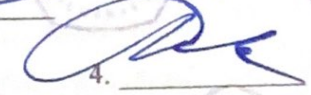
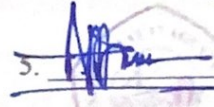

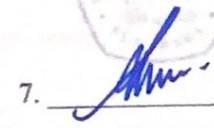

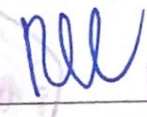

Program Studi Doktor Ilmu Administrasi



Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS.

DISERTASI INI TELAH DIUJI DAN DINILAI
OLEH PANITIA PENGUJI
PROGRAM STUDI DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
PADA TANGGAL, 04 November 2020

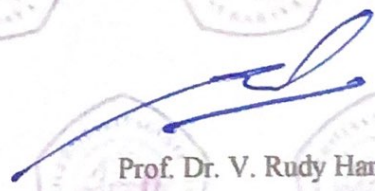
Tim Penguji

1. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA 1. 
2. Dr. Endro Tjahjono, MM 2. 
3. Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS. 3. 
4. Dr. Achluddin Ibnu Rochim, SH.,M.Si 4. 
5. Prof. Dr. Arif Darmawan, SU 5. 
6. Dr. H. Zakariya, M.S., MM. 6. 
7. Prof. Dr. Warsono, MS 7. 
8. Prof. Dr. Bagong Suryanto, M.Si 8. 
9. Prof. Dr. Amiartuti Kusmaningtyas, SH., MM 9. 
10. Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum. 10. 

Mengetahui
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik


Dr. Endro Tjahjono, MM.

Mengesahkan
Ketua
Program Studi Doktor Ilmu Administrasi


Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS.

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadi Sulistyو
NIM : 1171600005
Program Studi : Doktor Administrasi Publik

Menyatakan bahwa disertasi yang saya buat dengan judul "Permodelan Transformasi Kelembagaan Pengelolaan Dana Bergulir UPK PNPM Mandiri Perdesaan Pasca Pengakhiran Program" merupakan hasil karya sendiri dan bukan duplikasi dari karya orang lain. Di dalam naskah karya disertasi ini tidak ada karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, November 2020

at pernyataan


HADI SULISTYO
NIM: 1171600005

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hadi Sulistyو
Nomor Induk Mahasiswa : 1171600005

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya, karya ilmiah yang berjudul :

**“PERMODELAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN
DANA BERGULIR UPK PNPM MANDIRI PERDESAAN PASCA
PENGAKHIRAN PROGRAM”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : di Surabaya
Pada tanggal : 2020
Yang menyatakan




Hadi Sulistyو
NIM : 1171600005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian Disertasi dengan judul "Permodelan Transformasi Kelembagaan Pengelolaan Dana Bergulir UPK PNPM Mandiri Perdesaan Pasca Pengakhiran Program" dengan baik dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis memahami tanpa bantuan, doa, dan bimbingan dari semua orang, akan sangat sulit untuk menyelesaikan laporan disertasi ini. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan kontribusi kepada:

- Promotor Disertasi Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS,
- Ko Promotor Disertasi DR. Achluddin Ibnu Rochim, SH., M.SI,
- Segenap Tim penguji Disertasi:
 - Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS.
 - Prof. Dr. Bagong Suyanto Drs., M.Si.
 - Prof. Dr. Warsono, M.S
 - Prof. Dr. Arif Darmawan, SU
 - Dr. H. Zakariya, MS., MM
 - Dr. Endro Tjahjono, MM
- Keluarga tercinta: Istri dan Anak-anakku

Serta kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan Rahmat-Nya kepada Kita semua

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan laporan, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin

Surabaya, November 2020
Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PENGESAHAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Ruang Lingkup	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Kerangka Dasar Teori	21
2.2.1 Kebijakan Publik.....	21
2.2.2 Pemberdayaan Masyarakat.....	33
2.2.3 Kelembagaan	45
2.2.4 Transformasi	50
2.2.5 Pengakhiran PNPM-MPd.....	57
2.3 Kerangka Pemikiran.....	62
BAB III PROSEDUR PENELITIAN.....	67
3.1 Landasan Filosofi dan Pendekatan Penelitian	67
3.2 Objek dan Informan Penelitian	68
3.2.1 Objek Penelitian.....	68
3.2.2 Informan Penelitian.....	69
3.3 Metode Pengumpulan Data	69
3.4 Teknik Analisis Data.....	71
3.5 Teknik Pengabsahan Data	73
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	75
4.1 UPK Kecamatan Dringu	75
4.1.1 Kelembagaan Dana Bergulir di UPK Dringu	77

4.1.2 Mekanisme Perguliran di UPK Dringu	83
4.1.3 Identifikasi Permasalahan di UPK Dringu	85
4.2UPK Kecamatan Maron	86
4.2.1 Kelembagaan Dana Bergulir di UPK Maron.....	88
4.2.2 Mekanisme Perguliran di UPK Maron	89
4.2.3 Identifikasi permasalahan di UPK Maron	90
4.3BUMDesma Kecamatan Kraton.....	91
4.3.1 Keembagaan Dana Bergulir di BUMDesma Kraton	97
4.3.2 Mekanisme Perguliran di BUMDesma Kraton.....	101
4.3.3 Identifikasi Permasalahan di BUMDesma Kraton.....	101
4.4BUMDesma Kecamatan Sumbergempol.....	102
4.4.1 Kelembagaan Dana Bergulir di BUMDesma Sumbergempol	103
4.4.2 Mekanisme Perguliran di BUMDesma Sumbergempol	107
4.4.3 Identifikasi Permasalahan di BUMDesma Sumbergempol	108
4.5BUMDesma Kecamatan Sendang	109
4.5.1 Kelembagaan Dana Bergulir d BUMDesma Sendang.....	110
4.5.2 Mekanisme Perguliran di BUMDesma Sendang	113
4.5.3 Identifikasi Permasalahan di BUMDesma Sendang	113
4.6BUMDesma Kecamatan Singosari.....	114
4.6.1 Kelembagaan Dana Bergulir di BUMDesma Singosari	117
4.6.2 Mekanisme Perguliran di BUMDesma Singosari.....	119
4.6.3 Identifikasi Permasalahan di BUMDesma Singosari.....	120
4.7PBH Kecamatan Candipuro	121
4.7.1 Kelembagaan Dana Bergulir d PBH Candipuro.....	122
4.7.2 Mekanisme Perguliran di PBH Candipuro	125
4.7.3 Identifikasi Permsalahan di PBH Candipuro.....	126
BAB V PEMBAHASAN.....	127
5.1 Analisis Permasalahan Kelembagaan Dana Bergulir	127
5.1.1 Permasalahan Berdasarkan Aspek Filosofi	127
5.1.2 Permasalahan Berdasarkan Aspek Legalitas	131
5.1.3 Permasalahan Berdasarkan Aspek Kelembagaan	137
5.1.4 Permasalahan Berdasarkan Aspek SDM	140
5.1.5 Permasalahan Berdasarkan Aspek Keuangan.....	142
5.1.6 Permasalahan Beradasarkan Aspek Perkembangan Usaha.....	145
5.2 Analisis Model Kelembagaan	147
5.2.1 Model Kelembagaan UPK Orisinil	147
5.2.3 Model Kelembagaan PBH.....	154
5.3 Analisis Model Formulasi Kelembagaan	158
5.3.1 Aspek Filosofi Kelembagaan	158
5.3.2 Aspek Legalitas Kelembagaan	165
5.3.3 Aspek Kelembagaan (Manajemen Organisasi)	169

5.3.4 Aspek Sumber Daya Manusia	174
5.3.5 Aspek Keuangan	177
5.3.6 Aspek Perkembangan Usaha	181
5.4 Formulasi Implementasi Model Kelembagaan Terbaik	182
5.4.1 Formulasi Implementasi Kelembagaan Berdasarkan Aspek Filosofi	182
5.4.2 Formulasi Implementasi Kelembagaan Terbaik Berdasarkan Aspek Legalitas	184
5.4.3 Formulasi Implementasi Kelembagaan Terbaik Berdasarkan Aspek Kelembagaan	186
5.4.4 Formulasi Implementasi Kelembagaan Terbaik Berdasarkan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)	187
5.4.5 Formulasi Implementasi Kelembagaan Terbaik Berdasarkan Aspek Keuangan	189
5.4.6 Formulasi Implementasi Kelembagaan Terbaik Berdasarkan Aspek Perkembangan Usaha	192
BAB VI IMPLIKASI DAN PROPOSISI PENELITIAN	197
6.1 Implikasi Penelitian	197
6.1.1 Implikasi Teoritis	197
6.1.2 Implikasi Praktis	201
6.2 Proposisi	201
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	205
7.1 Kesimpulan	205
7.2 Rekomendasi	214
DAFTAR PUSTAKA	215

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu	7
Tabel 2. 2	Kerangka Pemikiran Penelitian	65
Tabel 3. 1	Pihak-pihak yang diundang dalam FGD	70
Tabel 5. 1	Persentase keberpihakan pada RTM	128
Tabel 5. 2	Perbandingan Model formulasi kelembagaan UPK PNPM-MPd pasca pengakhiran program dianalisis berdasarkan aspek filosofi / pemberdayaan masyarakat	164
Tabel 5. 3	Perbandingan bentuk badan hukum transformasi UPK dilihat dari beberapa aspek	166
Tabel 5. 4	Perbandingan Model formulasi kelembagaan UPK PNPM-MPd pasca pengakhiran program dianalisis berdasarkan aspek Kelembagaan	173
Tabel 5. 5	Perbandingan Model formulasi kelembagaan UPK PNPM-MPd pasca pengakhiran program dianalisis berdasarkan Aspek Sumberdaya Manusia	176
Tabel 5. 6	Perbandingan Model formulasi kelembagaan UPK PNPM-MPd pasca pengakhiran program dianalisis berdasarkan Aspek Keuangan	180
Tabel 5. 7	Perbandingan Model formulasi kelembagaan UPK PNPM-MPd pasca pengakhiran program dianalisis berdasarkan Aspek perkembangan usaha	181
Tabel 5. 8	Nilai dan Perkembangan Aset UPK Eks PNPM-MPd di lokasi penelitian	193
Tabel 7. 1	Hasil Kesimpulan	209

195	196
197	198
199	200
201	202
203	204
205	206
207	208
209	210
211	212
213	214
215	216
217	218
219	220
221	222
223	224
225	226
227	228
229	230
231	232
233	234
235	236
237	238
239	240
241	242
243	244
245	246
247	248
249	250
251	252
253	254
255	256
257	258
259	260
261	262
263	264
265	266
267	268
269	270
271	272
273	274
275	276
277	278
279	280
281	282
283	284
285	286
287	288
289	290
291	292
293	294
295	296
297	298
299	300
301	302
303	304
305	306
307	308
309	310
311	312
313	314
315	316
317	318
319	320
321	322
323	324
325	326
327	328
329	330
331	332
333	334
335	336
337	338
339	340
341	342
343	344
345	346
347	348
349	350
351	352
353	354
355	356
357	358
359	360
361	362
363	364
365	366
367	368
369	370
371	372
373	374
375	376
377	378
379	380
381	382
383	384
385	386
387	388
389	390
391	392
393	394
395	396
397	398
399	400
401	402
403	404
405	406
407	408
409	410
411	412
413	414
415	416
417	418
419	420
421	422
423	424
425	426
427	428
429	430
431	432
433	434
435	436
437	438
439	440
441	442
443	444
445	446
447	448
449	450
451	452
453	454
455	456
457	458
459	460
461	462
463	464
465	466
467	468
469	470
471	472
473	474
475	476
477	478
479	480
481	482
483	484
485	486
487	488
489	490
491	492
493	494
495	496
497	498
499	500
501	502
503	504
505	506
507	508
509	510
511	512
513	514
515	516
517	518
519	520
521	522
523	524
525	526
527	528
529	530
531	532
533	534
535	536
537	538
539	540
541	542
543	544
545	546
547	548
549	550
551	552
553	554
555	556
557	558
559	560
561	562
563	564
565	566
567	568
569	570
571	572
573	574
575	576
577	578
579	580
581	582
583	584
585	586
587	588
589	590
591	592
593	594
595	596
597	598
599	600

DAFTAR SINGKATAN

AD	: Anggaran Dasar
AKD	: Asosiasi Kepala Desa
ART	: Anggaran Rumah Tangga
BKAD	: Badan Kerjasama Antar Desa
BKD	: Badan Kerjasama Desa
BLM	: Bantuan Langsung Masyarakat
BMT	: Baitul Maal Wat Tamwil
BNI	: Bank Nasional Indonesia
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPKB	: Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
BP-UPK	: Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
BUMDesma	: Badan Usaha Milik Desa Bersama
CPM	: <i>Critical Path Method</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DAPM	: Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat
DAPM	: Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat
DBM	: Dana Bergulir Masyarakat
Dirjen	: Direktorat Jenderal
FFS	: <i>Fonkoze Financial Services</i>
Form	: Formulir
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
IPTW	: Insentif Pengembalian Tepat Waktu
ITS	: Institut Teknologi Sepuluh Nopember
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kemendes PDTT	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
KIM	: Kelompok Informasi Masyarakat
KK	: Kepala Keluarga
Kominfo	: Komunikasi dan Informatika
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
LKM	: Lembaga Keuangan Mikro
LPP	: Laporan Perkembangan Pinjaman
MAD	: Musyawarah Antar Desa
MCK	: Mandi Cuci Kakus
MDJS	: Mitra Desa Jatim Solusi
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>

OR	: <i>Operation Research</i>
Ormas	: Organisasi Masyarakat
P2KP	: Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	: Pajak Bumi Bangunan
PBH	: Perkumpulan Berbadan Hukum
PERDA	: Peraturan Daerah
Perdes	: Peraturan Desa
Permakades	: Peraturan Bersama Kepala Desa
PERT	: <i>Project, Evaluation, and Review Technique</i>
PKB	: Pajak Kendaraan Bermotor
PKH	: Proram Keluarga Harapan
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PKS	: Perjanjian Kersa Sama
PMD	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PNPM-MPd	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Pokmas	: Kelompok Masyarakat
Polindes	: Pondok Bersalin Desa
PPK	: Program Pengembangan Kecamatan
PPL	: Program Pengalaman Lapangan
PPOB	: Payment Point Online Bank
PT	: Perseroan Terbatas
PTO	: Petunjuk Teknis Operasional
PUAP	: Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
Rakor	: Rapat Koordinasi
RI	: Republik Indonesia
RTM	: Rumah Tangga Miskin
SDM	: Sumber Daya Manusia
SHU	: Sisa Hasil Usaha
SK	: Surat Keputusan
SOP	: <i>Standard Operational Procedure</i>
SP	: Simpan Pinjam
SPP	: Simpan Pinjam Perempuan
SWOT	: <i>Strength, Weakness, Opportunities, Threats</i>
THR	: Tunjangan Hari Raya
TK	: Taman Kanak-Kanak
TP	: Tim Pendanaan
TQM	: <i>Total Quality Management</i>
TV	: Tim Verifikasi

UEP : Usaha Ekonomi Poduktif
UPK : Unit Pengelola Kegiatan
UU : Undang-Undang

ABSTRAK

Isu strategis pasca program PNPM adalah pelestarian unit kegiatan perguliran UPK PNPM-MPd (Kelembagaan, Sistem dan Aset) yang masih berjalan sampai saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk: Mengidentifikasi permasalahan kelembagaan UPK PNPM-MPd pasca program. Mengidentifikasi model-model transformasi kelembagaan UPK PNPM-MPd pasca program. Menganalisis model kelembagaan UPK PNPM-MPd pasca program. dan Menyusun formulasi model kelembagaan PNPM-MPd terbaik pasca program. Metode penelitian yaitu Kualitatif Deskriptif, subjek penelitian adalah kelembagaan UPK PNPM-MPd di Jawa Timur. Pengumpulan data melalui observasi, FGD, wawancara, dan studi dokumentasi.

Hasil Penelitian menunjukkan permasalahan kelembagaan UPK eks PNPM-MPd dari aspek filosofi, legalitas, SDM, kelembagaan, keuangan, dan perkembangan usaha, antara lain: Pemanfaat dari RTM tidak lagi menjadi prioritas, Unit usaha dana bergulir tidak mempunyai legalitas usaha (lembaga keuangan), kelembagaan UPK lebih dikenal masyarakat dibanding kelembagaan transformasi, kurangnya dukungan teknologi operasional kelembagaan, kolektibilitas warisan program, dan kejenuhan perguliran. Model transformasi kelembagaan UPK PNPM-MPd pasca Program di Jawa Timur yaitu berbentuk UPK orisinal, BUMDesma, dan PBH. Hasil analisis model kelembagaan terdapat persamaan dan perbedaan dalam mekanisme pengelolaan dan dasar hukum yang digunakan oleh ketiga kelembagaan UPK eks PNPM-MPd. Formulasi Implementasi kelembagaan transformasi UPK PNPM-MPd terbaik yaitu: kelembagaan harus tetap mengakomodir RTM, pilihan badan hukum memberikan perlindungan atau payung hukum bagi pengelolaan lembaga, Sistem dan aktivitas kelembagaan bagian dari pilar pembangunan kecamatan, struktur kelembagaan dapat mengcover pengembangan kegiatan usaha, Mengakomodir peningkatan kapasitas SDM, Mempunyai SOP dalam menekan kolektibilitas pinjaman.

Rekomendasi penelitian : Aset dana bergulir UPK sebagai warisan program PNPM-MPd harus ditegaskan sebagai dana abadi masyarakat, Badan Hukum kelembagaan UPK Eks PNPM-MPd penting untuk di implementasikan, diperlukan identifikasi dan pemetaan secara menyeluruh pada UPK eks PNPM-MPd di Jawa Timur, dan diperlukan kajian legalitas usaha dana bergulir dalam kaitan dengan aturan Lembaga Keuangan Mikro.

Keyword : transformasi UPK PNPM-MPd, implementasi formulasi kelembagaan

ABSTRACT

The preservation of the Activity Management Unit of the Rural Community Empowerment National Program (UPK PNPM-MPd), involving its institutional, systemic, and asset problems, has become a strategic issue still running today. This study aimed to identify those institutional problems, identify models of post-program institutional transformation, and analyze and finally implement the best institutional formulation models after the program termination. This research used descriptive-qualitative method, taking the UPK PNPM-MPd institution in East Java as the research subject. Data was collecting by observation, FGD, interviews, and documentary research.

The research showed some problems faced by the ex-UPK PNPM-MPd, in the aspects of philosophy (RTM wasn't a priority), legality (business legality), human resources, institutions (support technology), finance (collectibility of legacy programs), and business development (saturation of revolving businesses). The identification of the post-UPK PNPM-MPd institutional transformation models in East Java found UPK in its original form, BUMDesma, and PBH. The results of the analysis of the institutional model found that there was equality and management in management and the legal basis used from the three ex-PNPM-MPd UPK institutions. The implementation of the best formulation of the UPK PNPM-MPd transformation institutional model must include the following aspects: the institution must still accommodate RTM groups; the choice of legal entity types should provide protection or legal umbrella for institutional management; institutional structures should cover the development of business activities and accommodate human resource capacity building programs, and; revolving fund managers should have a strategy or SOP in suppressing credit collectibility.

The researcher recommended that the UPK revolving fund assets as a legacy of the PNPM-MPd program should be affirmed as a community endowment fund; the ex-UPK PNPM-MPd revolving fund legal entity is essential to implement; a comprehensive identification and mapping of the ex-UPK PNPM-MPd in East Java is necessary to perform, and; it is necessary to study the legality of a revolving fund business concerning the regulation of Micro Finance Institutions.

Keywords : transformation of UPK PNPM-MPd, implementation of institutional formulations